

**UPAYA BINA-DAMAI PEMERINTAH THAILAND DALAM  
MENURUNKAN INTENSITAS KONFLIK DI THAILAND SELATAN,  
2013-2018**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Arief Cahyo Baskoro**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA BINA-DAMAI PEMERINTAH THAILAND DALAM MENURUNKAN INTENSITAS KONFLIK DI THAILAND SELATAN, 2013-2018**

**Oleh**

**ARIEF CAHYO BASKORO**

Upaya pemerintah Thailand dalam menyatukan keberagaman pada satu kenegaraan, mengalami penolakan oleh etnis Melayu-Muslim di Thailand Selatan. Penolakan oleh etnis Melayu-Muslim membentuk suatu gerakan separatis yang menyebabkan konflik internal antara pemerintah dengan etnis tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya bina-damai yang dilakukan oleh pemerintahan Thailand dalam menurunkan intensitas konflik di Thailand Selatan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik dengan menggunakan konsep bina-damai. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data dari dokumen seperti berita, buku, dokumen penelitian, artikel, dan situs website resmi negara. Kajian terhadap dokumen dilakukan dengan seleksi dan kategorisasi untuk menemukan kesesuaian data yang diperlukan dan validnya data tersebut.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini bahwa; 1) pemerintah Thailand melakukan dialog dengan kelompok separatis di Thailand Selatan untuk menemukan jalan upaya bina-damai dan menghentikan intensitas konflik; 2) adanya pernyataan resmi dan tuntutan yang dilakukan oleh pihak Barisan Revolusi Nasional (BRN) sebagai perwakilan dari kelompok separatis; serta 3) adanya bantuan dari pihak eksternal yakni *Malaysian Participation* yang bekerjasama dengan *National Security Council* (NSC) sebagai fasilitator untuk melakukan upaya *peace dialogue* bagi kedua pihak yang sedang berkonflik.

Kata kunci: Thailand Selatan, upaya bina-damai, penurunan intensitas konflik, dan *peace dialogue*.

## **ABSTRACT**

### **PEACE-BUILDING EFFORTS OF THE THAILAND GOVERNMENT TO REDUCE THE INTENSITY OF CONFLICT IN SOUTH THAILAND, 2013-2018**

**By**

**ARIEF CAHYO BASKORO**

The Thai government's efforts to unite diversity into one state have been rejected by the Malay-Muslim ethnic groups in Southern Thailand. The rejection by the Malay-Muslim ethnic groups formed a separatist movement that caused internal conflicts between the government and the ethnic groups. The purpose of this study was to determine the peace-building efforts carried out by the Thai government in reducing the intensity of conflict in Southern Thailand. The theory used in this research is conflict theory by using the peace-building concept. This research method is qualitative by using data collection methods from documents such as news, books, research documents, articles, and official state websites. The study of documents is carried out by selection and categorization to find the suitability of the required data and the validity of the data. The results obtained from this study that; 1) the Thai government conducts dialogue with separatist groups in Southern Thailand to find ways to build peace and stop the intensity of the conflict; 2) the existence of official statements and demands made by the National Revolutionary Front (BRN) as representatives of the separatist group; and 3) assistance from external parties, namely the Malaysian Participation in collaboration with the National Security Council (NSC) as a facilitator to conduct peace dialogue efforts for the two parties in conflict.

**Keywords:** Southern Thailand, peace-building efforts, reducing conflict intensity, and peace dialogue.

**Upaya Bina-Damai Pemerintah Thailand dalam Menurunkan Intensitas  
Konflik di Thailand Selatan, Tahun 2013-2018**

Oleh

**Arief Cahyo Baskoro**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hubungan Internasional**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**



Judul Skripsi : **UPAYA BINA-DAMAI PEMERINTAH THAILAND DALAM MENURUNKAN INTENSITAS KONFLIK DI THAILAND SELATAN, 2013-2018**

Nama Mahasiswa : **Arief Cahyo Baskoro**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1516071096


Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

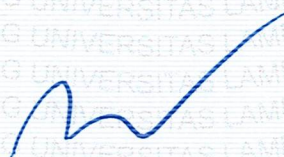
**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Gita Karisma, S.IP., M.Si.**  
NIP 19870128 201404 1 006

  
**Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A.**  
NIP 231602880717201

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

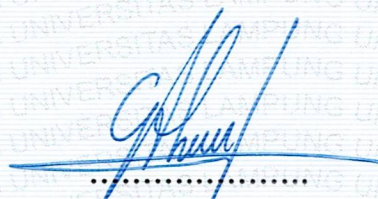
  
**Dr. Ari Darmastuti, M.A.**  
NIP 19600416 198603 2 002



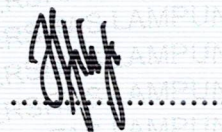
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

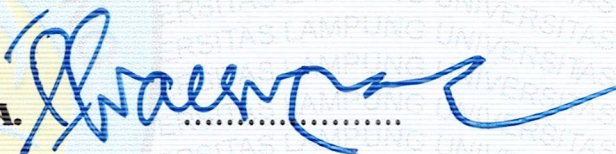
**Ketua : Gita Karisma, S.IP., M.Si.**



**Sekretaris : Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A.**



**Penguji : Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
**NIP. 19610807 198703 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Juni 2022**



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Arief Cahyo Baskoro

1516071096

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti lahir di Branti Raya, Lampung Selatan, Lampung, pada 2 Oktober 1996. Peneliti merupakan anak dari pasangan Bapak Bambang Nova Setyanto dan Ibu Surtiyani sebagai putra keempat dari empat bersaudara, yaitu merupakan adik dari Adityo Mursitanyo, Aninditha Destriyana A.N, dan Akbar Setyo Nugroho.

Peneliti menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 1 Merak Batin, Natar, pada tahun 2003 hingga 2009. Setelah lulus dari Sekolah Dasar, Peneliti melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Natar pada tahun 2009 hingga 2012. Lalu setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama, Peneliti melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Natar pada tahun 2012 hingga 2015.

Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Strata-1 di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2015, dengan konsentrasi studi Keamanan. Selama masa perkuliahan, Peneliti telah mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik. Peneliti pernah mengikuti organisasi Cendekia FISIP di tahun 2016-2018. Peneliti juga berpartisipasi pada kegiatan Ospek Mahasiswa Baru Angkatan 2016 sebagai Komisi Disiplin (KOMDIS), dan Peneliti juga telah melaksanakan program internship di kantor Imigrasi kelas 1 Bandar Lampung pada tahun 2018.



## PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur,  
kupersembahkan karya sederhana ini kepada semua yang telah menjadi bagian  
dalam hidupku:

Allah SWT,  
Atas petunjuk serta karunianya-Nya, Peneliti telah mampu menyelesaikan skripsi  
ini.

Kepada kedua orangtuaku sebagai alasan untuk selalu semangat dalam  
menjalankan tanggung jawabku. Terima kasih yang tak terhingga atas segala  
doanya yang terbaik, kasih sayang, pengorbanan dan dukungan yang tak henti-  
hentinya diberikan kepadaku hingga aku bisa berada di titik ini.

Kepada saudara-saudara ku, terima kasih karena selalu ada untuk memberikan  
motivasi dan dukungan kepadaku.

Kepada sahabat dan teman-temanku, terima kasih karena telah memberikan  
warna, cerita dan juga semangat kepadaku.

Kepada dosen-dosenku, terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya serta  
bimbingannya yang telah diberikan selama ini, semoga dapat menjadi bekal  
untukku kelak.

Serta terima kasih pada Almamaterku tercinta, Universitas Lampung, yang telah  
memberiku banyak pengalaman berharga, dan semoga dapat menjadi pelajaran  
yang berguna dalam hidupku.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil‘alamin, puji dan syukur Peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan ridha-Nya Peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Upaya Bina-Damai Pemerintah Thailand dalam Menurunkan Intensitas Konflik di Thailand Selatan, Tahun 2013-2018”**. Shalawat serta salam tak lupa Peneliti sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang menjadi motivasi untuk terus belajar kedepannya. Selama proses penyusunan skripsi ini, Peneliti telah memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, izinkan Peneliti untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Ibu Dwi Handayani, selaku Dosen Pembimbing Utama Pertama yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing Peneliti hingga Seminar Proposal. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pertama (Pengganti) yang dengan sabar telah membimbing, memberikan arahan serta masukannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Mba Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan banyak ilmu dan membantu Peneliti dalam menyelesaikan skripsi serta meluangkan waktunya untuk membimbing,



memberikan nasihat dan masukan kepada Peneliti baik sebagai dosen maupun sebagai mba;

5. Mas Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berguna pada skripsi ini.
6. Seluruh jajaran Dosen, FISIP Universitas Lampung, khususnya jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi Peneliti.
7. Seluruh staf dan karyawan FISIP universitas Lampung khususnya jurusan Hubungan Internasional.
8. Terimakasih kepada papa dan mama, yang telah merawat dan memberikan support hingga saat ini, yang mana doa dan dukungan kalian Peneliti dapat menyelesaikan pendidikannya sebagai Sarjana Mahasiswa Hubungan Internasional;
9. Terimakasih kepada saudara-saudara dan keluargaku, Mas Dito, Mba Anin, Mas Akbar, Mba Lisa, Mba Risa, Umar, Layla, Alminna, yang selalu ada, memberikan keceriaan, dukungan dan juga motivasi;
10. Terimakasih kepada Mela Tri Ayum Septia, terimakasih karena telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.
11. Terimakasih kepada member Kajian Ilmu Kemanusiaan; Bang In, Bang Wayan, Bang Eja, Fitrah, Gedo, Bajang, Malebi, Pio yang telah mengajari banyak hal tentang isu kemanusiaan, selalu memberikan dukungan, dan keceriaan bagi Peneliti.
12. Terimakasih kepada para teman-teman seperjuangan kuliah, Azizul, Albin, Aam, Bimo, Silvester, Suci, Eva, Eno, Fitrah, Geraldo, Fijar, Kent, Arif Saleh, Nyiayu, Anggun, Susi, Imel, Revih, Adit, Olvy, Shafira, Dinda dll.
13. Terimakasih untuk Aditya dan Malebi yang telah menjadi tempat berkeluh-kesah tentang skripsi, dan berbagi cerita, semoga impian serta cita-cita kalian tercapai.
14. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Hubungan Internasional angkatan 2015 tanpa terkecuali, dan juga para penghuni lantai dua gedung

E FISIP Universitas Lampung yang sangat bersemangat dalam bimbingan skripsi, semoga kesuksesan dan keberuntungan selalu menyertai kita semua.

15. Seluruh pihak yang memberikan doa, dukungan dan bantuan kepada Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan dedikasi yang telah diberikan oleh semua pihak yang membantu dalam proses yang dijalani oleh Peneliti.

Bandar Lampung, 13 Juni 2022  
Peneliti,

Arief Cahyo Baskoro



**MOTTO**

*"Please take a long, hard look at your textbook,*

*Cause I'm History"*

(Owl City)

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....	iv
DAFTAR SINGKATAN .....	v
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Konseptual .....	15
2.2.1 Teori Konflik.....	15
2.2.2 Konsep Bina-damai .....	18
2.3 Kerangka Pemikiran .....	20
<b>III. METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	23
3.2 Fokus Penelitian .....	24
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	25
3.5 Teknik Analisis Data.....	25
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
4.1 Konflik Internal di Thailand.....	29



4.2 Penyebab Konflik Internal di Thailand Selatan .....	33
4.3 Upaya Bina Damai dan Analisi Penurunan Intensitas Konflik di Thailand Selatan .....	37
A. Upaya Bina-Damai oleh Pemerintah Thailand.....	42
B. Upaya Bina-Damai oleh Barisan Revolusi Nasional (BRN) .....	44
C. Upaya Bina-Damai oleh <i>Malaysian Participation</i> .....	46
4.4 Analisis Penurunan Intensitas Konflik .....	47
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 2.2 Sebab Utama dan Sebab Pemicu Konflik Internal .....	17
Tabel 4.1 Kategorisasi Kebijakan Integrasi Thailand dan Dampaknya di Thailand Selatan .....	36

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta di Thailand Selatan .....	3
Gambar 1.2 Grafik Data Korban di Thailand Selatan Tahun 2013-2018 ....	6
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran .....	22
Gambar 4.1 Situasi di Thailand Selatan, tahun 2004-2018 .....	48
Gambar 4.2 Grafik Situasi di Thailand Selatan, tahun 2004-2018 .....	49
Gambar 4.3 Insiden di Thailand Selatan Berdasarkan Area Geografis, tahun 2004-2017 .....	53
Gambar 4.4 Grafik Jumlah Kekerasan di Berbagai Distrik di Thailand .....	54
Gambar 4.5 Grafik Pengeluaran Anggaran Untuk Resolusi Konflik di Thailand Selatan, tahun 2004-2017 .....	56



## DAFTAR SINGKATAN

AEC	: <i>ASEAN Economic Community</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BRN	: Barisan Revolusi Nasional
CSCD	: <i>Center for Conflict Studies and Cultural Diversity</i>
DSW	: <i>Deep South Watch</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRW	: <i>Human Right Watch</i>
INGO	: <i>International non-Governmental Organizations</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NCPO	: <i>National Council for Peace and Order</i>
NPKC	: <i>National Peacekeeping Council</i>
NSC	: <i>National Security Council</i>
OIC	: <i>Organisation of Islamic Cooperation</i>
OKI	: Organisasi Kerjasama Islam
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PULO	: <i>Pattani United Liberation Organisation</i>
SBPAC	: <i>the Southern Border Provinces Administrative Centre</i>
SBP	: <i>Southern Border Province</i>
SCMP	: <i>South China Morning Post</i>
UCDP	: <i>Uppsala Conflict Data Program</i>
UN	: <i>the United Nations</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam hubungan internasional, konflik internal merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari oleh suatu negara. Keberagaman suku, ras, agama, dan golongan yang dimiliki oleh negara tersebut dapat menjadi awal mula perselisihan yang mengakibatkan konflik. Thailand merupakan salah satu negara yang tidak terlepas dari konflik internal karena adanya keberagaman agama atau etnis di negaranya, salah satunya adalah etnis Melayu-Muslim yang berkedudukan di wilayah Thailand Selatan.

Upaya pemerintah Thailand dalam menyatukan keberagaman pada satu kenegaraan, mengalami penolakan oleh etnis Melayu-Muslim di Thailand Selatan. Penolakan oleh etnis tersebut membentuk suatu gerakan separatis untuk melawan pemerintahan yang ada. Penolakan ini terjadi karena gerakan separatis tersebut ingin membentuk sebuah pemerintahan sendiri.

Secara aspek geografis, Thailand merupakan negara terbesar ketiga di Asia Tenggara. Nama Thailand dalam Bahasa Thai merupakan *Parathet Thai* yang berarti 'Tanah Kebebasan'. Thailand merupakan negara di Asia Tenggara yang sama sekali tidak pernah dijajah oleh negara dari Eropa. Meskipun negara ini tidak pernah dijajah, hal ini tidak menjamin akan kestabilan politiknya. Hal ini karena adanya kudeta yang dilakukan oleh militer mereka yang menyebabkan ketidakstabilan politik di Thailand. Akibat dari ketidakstabilan politik pemerintahannya tersebut, menciptakan konflik dan gerakan separatis yang terjadi di wilayah Thailand Selatan yang mayoritas ber-etnis Melayu-Muslim. Terdapat tiga provinsi di Thailand Selatan yang mengalami dinamika kekerasan, pemberontakan, dan gerakan separatis adalah Provinsi Yala, Narathiwat, dan

Pattani yang dahulunya merupakan bagian dari Kerajaan Pattani. Kerajaan ini hingga awal abad ke-20 merupakan satu dari entitas di *British Malaya* (Storey, 2007).

Gerakan separatis yang terjadi di Thailand Selatan salah satunya tidak dapat dipisahkan dari *the Anglo Siam Treaty* pada tahun 1909 ketika Bangkok dan Inggris secara resmi menganeksasi Pattani<sup>1</sup> menjadi salah satu bagian dari Kerajaan yang di era modern disebut dengan Thailand. Dalam perjanjian tersebut berisi perjanjian bahwa wilayah Pattani<sup>2</sup> (Thailand Selatan) tidak lagi menjadi bagian dari Kerajaan Melayu, melainkan tergabung ke dalam Kerajaan Siam (Thailand). Hal inilah yang menjadi pertentangan dan diikuti dengan adanya gerakan separatis di wilayah tersebut.

Pada Realitanya masyarakat Pattani memiliki budaya, agama, dan tradisi yang berbeda dengan masyarakat Thailand pada umumnya. Namun demikian secara bertahap Kerajaan Thailand mulai memberlakukan kebijakan khusus terhadap kawasan tersebut, seperti menggantikan identitas agama dan budaya Pattani yang awalnya Melayu-Muslim menjadi Thailand Budhha. Thailand telah berubah-ubah strategi asimilasi<sup>3</sup> dan akomodasinya dengan tujuan menggabungkan populasi mayoritas Melayu-Muslim di wilayah tersebut ke dalam identitas Thailand yang menyeluruh. (Kusuma, 2016). Identitas Thailand didasarkan pada Semboyan; Bangsa, Agama dan Raja. Muslim Melayu kesulitan dalam merangkul semboyan tersebut, singkatnya masyarakat Pattani banyak yang berpegang teguh pada konsep negara yang berbeda, agama yang berbeda, dan raja yang berbeda. (McCargo, 2014) Berikut merupakan gambar dari peta Thailand Selatan.

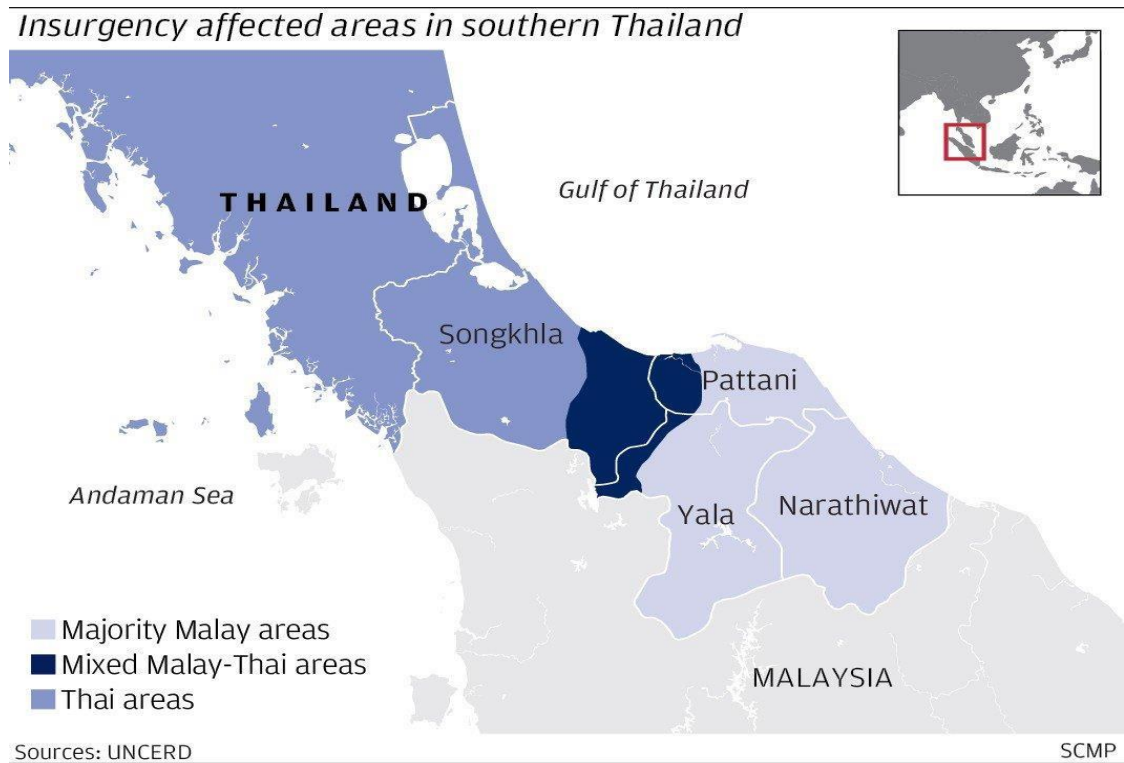
---

<sup>1</sup> Patani adalah ejaan bahasa Melayu yang merujuk kepada wilayah bekas Kesultanan Patani, sedangkan Pattani adalah ejaan Bahasa Thai yang merujuk kepada changwat (provinsi) Pattani.

<sup>2</sup> Sebagai salah satu dari empat provinsi Islam di bagian selatan Thailand sekarang ini. Ejaan Patani merujuk kepada wilayah bekas Kesultanan Patani (sehingga 1901), sedangkan Pattani merujuk kepada wilayah Pattani setelah reformasi pemerintahan pada tahun 1901 ditandai dengan Proklamasi Diraja 1901 (1901 Royal Decree).

<sup>3</sup> Kebijakan asimilasi budaya adalah bentuk nyata perang psikologi melalui kekerasan kultural yang dilakukan untuk menghapus budaya Melayu Islam di seluruh wilayah Thailand. Pada rezim Jenderal Phibul Songkhram, dimana dalam kebijakan tersebut Thai Budha ditetapkan sebagai identitas dan budaya tunggal Thailand.





Gambar 1.1: Peta Thailand Selatan. (Sumber: South China Morning Post 2019)

Peta di atas menggambarkan bahwa luas wilayah Thailand yang sebesar 513.120 km<sup>2</sup> ini berpenduduk 62.200.824 jiwa dengan agama Buddha sebagai mayoritas. Thailand dibagi atas 76 Provinsi dengan 1 wilayah administrasi khusus yakni Bangkok. Dalam gambar peta 1.1, daerah yang berwarna abu-abu adalah wilayah konflik yang berada di Thailand meliputi 4 provinsi, yaitu Yala, Narathiwat, Pattani yang mayoritas etnis Muslim Melayu, dan wilayah Songkhla sebagian ada yang berwarna ungu-tua tergabung dua etnis yakni Thai-Buddha dan Melayu-Muslim.

Menurut David Wyatt melalui tulisannya yang berjudul “Hikayat Pattani” munculnya gerakan Separatis Pattani dilatarbelakangi oleh; (Wyatt, 1967)

1. Penaklukan oleh Kerajaan Siam yang dahulu Kerajaan Pattani merupakan Kerajaan yang Makmur serta pelabuhannya merupakan tempat pusat perdagangan terbesar kala itu di Asia Tenggara, akibat aneksasi oleh Kerajaan Siam serta gaya pemerintahan yang baru dan kebijakan yang berbeda membuat adanya gerakan Separatis.

2. Wilayah Pattani Raya terkenal akan kekayaan alam yang melimpah serta sebagai sumber penghasil minyak bumi. Akan tetapi masyarakat Pattani sendiri tidak bisa menikmati hasilnya, hasil kekayaan alam hanya dinikmati oleh Pusat. Di mana pemerintah Thailand lebih menggunakan APBN nya untuk pembangunan yang ter-sentralisasi di Ibu Kota negara tersebut. Sehingga penduduk Melayu-Muslim di wilayah Thailand Selatan merasa termarginalisasi.
3. Adanya kebijakan Migrasi penduduk dari wilayah Utara menyebabkan adanya kesenjangan antara penduduk Melayu-Muslim dengan penduduk non-muslim. Para penduduk Thailand Budhha dari wilayah Utara dipindahkan ke wilayah Selatan. Karena kebijakan ini sejatinya untuk meratakan penduduk di wilayah Selatan serta untuk mengisi jabatan-jabatan penting di wilayah Selatan.

Kebijakan asimilasi budaya yang sangat mengekang kebebasan hidup masyarakat Muslim Thailand yang dimulai pada tahun 1938, secara garis besar kebijakan tersebut berisi tentang keputusan pemerintah<sup>4</sup> yakni, adanya aturan tertentu tentang cara berpakaian dengan pakaian gaya barat dan kewajiban mengadopsi nama Thai jika seorang Melayu Muslim hendak memasuki sekolah negeri atau ketika hendak melamar pekerjaan pada instansi pemerintah. Akibatnya banyak Melayu Muslim yang gagal masuk sekolah negeri untuk mengakses pendidikan, di dalam sekolah pun masyarakat Melayu Muslim dilarang menggunakan Bahasa Melayu dalam percakapan. (Yazid, 2009, pp. 5-6)

Pemerintah Bangkok juga menerapkan *Martial Law*<sup>5</sup> guna mengatasi krisis adanya gerakan separatis di wilayah Thailand Selatan sebagai isu masalah nasional negara. kebijakan ini mendapatkan banyak pertentangan dari berbagai pihak, karena kebijakan ini memberikan hak kekuasaan yang mutlak pada militer. Karena hal ini pula, pasukan keamanan Thailand memeriksa rumah, masjid, serta pondok pesantren. Mereka mengira bahwa tempat ini sebagai tempat persembunyian

---

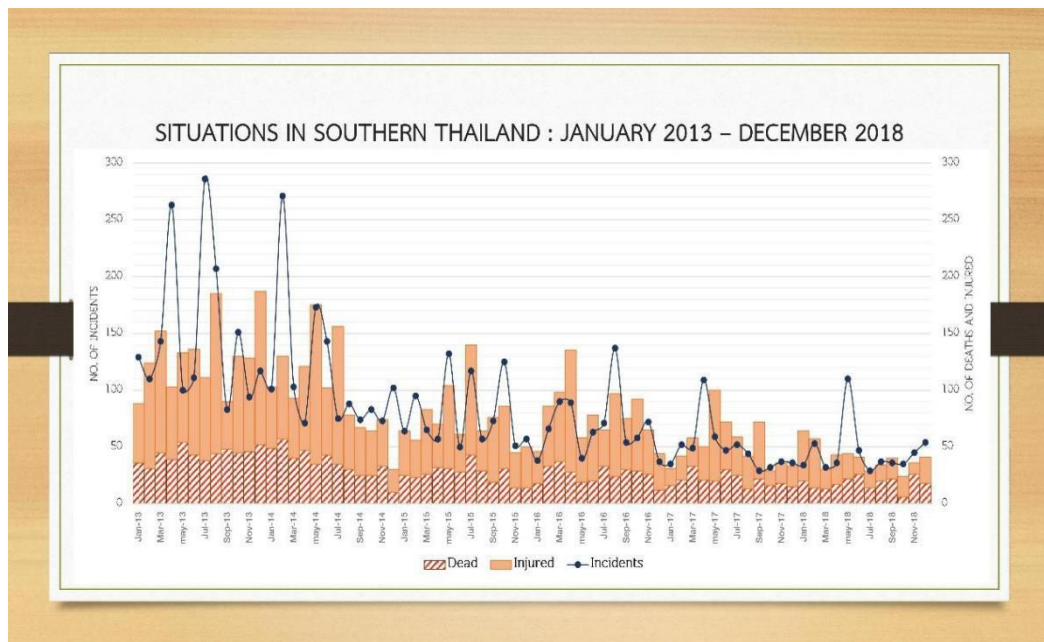
<sup>4</sup> Salah satu rezim yang paling diskriminatif bahkan represif adalah rezim Jenderal Phibul Songkhrum dimana masyarakat Melayu Muslim telah menjadi dasar asimilasi (1938-1944 dan 1947-1957)

<sup>5</sup> *Martial Law* di Thailand sudah pernah terjadi sebelum rezim Thaksin Shinawatra. Disahkan pada Januari 2004, kebijakan ini dikhususkan meliputi wilayah Pattani, Yala, dan Narathiwat sebagai respon adanya gerakan separatis di wilayah ini. Lalu, pada rezim Prayuth Chan-Ocha menerapkan *Martial Law* diseluruh Thailand.

anggota yang terlibat dengan kumpulan anggota separatis, dan banyak pemuda serta tokoh agama Melayu ditangkap setelah kebijakan ini diterapkan. (Yazid, 2009, p. 13)

Memasuki tahun 2014 pemerintahan Yingluck Shinawatra dikudeta oleh Prayuth Chan-ocha yang banyak dinilai represif. Walaupun dia menghentikan *Martial Law*, tetapi Prayuth mengubahnya dengan Pasal 44 konstitusi sementara yang dikenal sebagai Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO), menggunakan kekuasaan untuk mencari, menangkap dan menahan orang tanpa hukum pengawasan yudisial. Setelah kudetanya ia mengkampanyekan “kebahagian” dan bahkan merilis lagu yang berjudul “*Returning Happiness to Thailand*” dan juga adanya perebutan kekuasaan dari militer dan berjanji untuk “mengembalikan cinta”.

Namun seiring berjalannya waktu, banyak lawan politiknya yang mengkritisi kebijakan dari Prayuth. Ia juga dinilai mengabaikan nilai-nilai Demokrasi, padahal ia pernah berjanji kepada rakyat Thailand untuk kembali kepada pemerintahan yang demokratis, tetapi justru sebaliknya dia berlaku sewenang-wenang, menuntut ratusan aktivis, jurnalis, politisi, dan menyebut lawan politiknya sebagai “*Human Trash*” (FP, *The New King of Siam Prayuth Junta*, 2015). Berikut merupakan gambar grafik korban konflik yang terjadi di Thailand Selatan.



Gambar 1.2: Gambar grafik data korban di Thailand Selatan Tahun 2013 – 2018.  
(Sumber: Deep South Watch)

Berdasarkan gambar di atas, jumlah korban jiwa di Thailand Selatan sejak 2013 telah menurun dari 521 orang pada 2013 menjadi 309 orang. Pada 2016-2018 jumlah korban jiwa berkurang, jumlah orang terluka dalam kerusuhan meskipun bervariasi dengan jumlah kejadian pada waktu-waktu tertentu, tetapi jumlah kematian menurun sejak 2013. Namun latar belakang penurunan konflik ini berbeda dengan yang pertama kalinya. Penurunan pada tahun 2018 merupakan hasil dari operasi militer yang intens sesuai dengan kebijakan negara selama waktu itu untuk meningkatkan kekuatan militer di daerah tersebut, selain itu juga terdapat penegakan hukum khusus dan peningkatan standar keamanan. Namun harus juga dipahami bahwa penurunan peristiwa konflik pada tahun 2013 adalah titik balik yang signifikan karena operasi yang dikenal sebagai proses perdamaian yang dimulai tahun itu sebagai hasil adaptasi oleh semua pihak di bidang ini. Konflik menyebabkan situasi berubah secara sistematis. Inilah perbedaan dalam "penurunan" dari dua peristiwa konflik tersebut.



Upaya penyelesaian konflik di Thailand Selatan dikatakan tidak mudah. Kurangnya profesionalitas dan komitmen dari pemerintah Thailand, serta sikap pemerintah yang menolak melakukan negosiasi dan dialog yang intensif dengan kelompok pemberontak menjadi salah satu faktor yang memperparah hubungan antara kedua belah pihak. Terlebih lagi kepemimpinan dari pihak pemberontak sendiri juga tidak jelas karena mereka terpolarisasi ke dalam beberapa kelompok. Upaya Inisiasi penyelesaian konflik di Thailand Selatan justru muncul dari eksternal seperti organisasi internasional yang berbasis Islam, yaitu Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Malaysia.

Faktor kelanjutan dari proses perdamaian *long-term* dalam menyelesaikan konflik pada maret 2018, delegasi OKI mengunjungi provinsi Pattani, Narathiwat dan Yala di mana para delegasi bertemu dan berinteraksi dengan penduduk setempat dari berbagai latar belakang Muslim, Budha, Melayu, Cina, Thailand, yang hidup berdampingan, dan bertukar pandangan dengan pemerintah lembaga yang mengerjakan pembangunan sosial dan ekonomi *Southern Border Province* (SBP) serta keamanan.

Delegasi itu mencatat bahwa umat Islam di Thailand menikmati hak kebebasan beragama. Delegasi menyatakan dukungan OKI untuk dialog inklusif Pemerintah dengan berbagai kelompok dan meminta semua kelompok untuk berpartisipasi dalam dialog. Delegasi itu menegaskan bahwa OKI menolak segala bentuk kekerasan dan tidak mendukung gerakan kemerdekaan atau separatis. OKI memuji kebijakan pembangunan Thailand sebagai model peran dalam merawat warga Muslimnya dengan baik. Dalam kasus ini, Delegasi lebih lanjut memuji pengembangan pendidikan di SBP dan menekankan pentingnya pendidikan Seni dan Sains dan pelatihan kejuruan, bersama dengan studi agama, sebagai alat untuk memaksimalkan potensi pemuda Muslim yang akan menjadi kekuatan pendorong masa depan negara. OKI menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan bekerja sama dengan Pemerintah Thailand. (MFA, 2018) Penelitian ini membahas tentang kebijakan pemerintah Thailand kepada penduduk di wilayah Thailand Selatan terutama 4 Provinsi Yala, Narathiwat, Pattani, dan Songkhla. Serta membahas gerakan Separatis yang terjadi di wilayah tersebut.

Fokus penelitian ini akan berada dikisaran tahun 2013-2018 di mana pada periode tersebut jumlah korban konflik Thailand Selatan telah menurun. Selain itu di tahun 2013 Pemerintah Thailand dan perwakilan Thailand Selatan sepakat untuk melaksanakan negosiasi sebagai bagian dari proses bina damai.

Selain itu penelitian ini juga akan membahas *Historical Background* yang menjadi awal terjadinya gerakan separatis di wilayah tersebut. Penjelasan di atas membuat peneliti ingin mengetahui apa yang membuat penurunan intensitas konflik yang terjadi di Thailand Selatan. Sehingga dari pemaparan latarbelakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fenomena yang terjadi dan menarik pokok permasalahan dengan judul: ***“Upaya Bina-Damai Pemerintah Thailand dalam menurunkan Intensitas Konflik di Thailand Selatan, tahun 2013-2018.”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perubahan konstelasi politik di Thailand membuat hubungan antara pemerintah pusat dengan Pattani sering mengalami hambatan dan semakin memperburuk konflik yang terjadi di Thailand Selatan. Berbagai upaya penyelesaian konflik telah diupayakan oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah internal Thailand, maupun dari pihak eksternal seperti Malaysia, OKI. Proses penyelesaian konflik di Thailand Selatan yang sudah berlarut-larut telah memasuki masa *long-term*. Akan tetapi pada tahun 2013 hingga 2018, konflik di Thailand Selatan mengalami penurunan intensitas konfliknya. Maka untuk menganalisa hal tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah **“Bagaimana upaya bina-damai yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam menurunkan intensitas konflik di Thailand Selatan pada tahun 2013-2018?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan faktor penyebab konflik internal yang terjadi antara pemerintah Thailand dengan etnis Melayu-Muslim di Thailand Selatan.
- b. Menganalisis proses Bina-Damai dari konflik internal yang terjadi di Thailand Selatan pada tahun 2013-2018.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat secara akademis:

Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengetahui mengenai faktor yang dapat menyebabkan konflik internal terjadi di suatu negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi para peneliti maupun pemerintah untuk mengetahui proses yang dapat dilakukan dalam upayanya untuk menyelesaikan suatu konflik dalam lingkungan masyarakat, serta dapat menjadi bahan pertimbangan atau Literature Review bagi penelitian selanjutnya yang dapat mengurangi tingkat eskalasi konflik bahkan dapat menyelesaikan konflik itu sendiri.

- b. Manfaat secara praktis:

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi LSM, pemerintahan, masyarakat internasional dan para peneliti terkait konflik internal dan penyebab dari konflik itu sendiri. Hal ini, diharapkan dapat digunakan sebagai suatu gambaran terkait upaya penyelesaian konflik internal yang terjadi di suatu negara oleh pemerintah maupun LSM, serta pihak-pihak yang berwenang dalam menyelesaikan konflik tersebut. Sehingga dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi, penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi pihak-pihak tersebut dalam proses penyelesaiannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam memahami konsep dan teori yang digunakan penelitian, peneliti telah melakukan tinjauan pustaka dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan upaya bina-damai. Pada penelitian ini, peneliti memasukan lima penelitian terdahulu sebagai referensi peneliti dalam menulis penelitian ini. Penelitian terdahulu yang peneliti gunakan juga bertujuan untuk membedakan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, akan tetapi peneliti juga tetap memperhatikan kesamaan di teori-konsep, metodologi maupun fenomena yang terjadi untuk lebih memahami teori dan konsep yang digunakan.

Penelitian pertama, Peneliti menggunakan penelitian dari Desy Arisandy yang berjudul “Diplomasi Thailand-Malaysia Dalam Mengatasi Gerakan Separatis di Thailand Selatan Periode 2000-2009”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisa data deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang cara Malaysia me- *mediumisasi* gerakan separatis di Thailand Selatan dengan Pemerintah Thailand dengan cara diplomasi dan juga membahas hubungan diplomasi antara dua negara tersebut setelah melakukan upaya *mediumisasi* dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan, serta membahas kepentingan kedua negara melakukan berbagai kunjungan kenegaraan dan juga kesepakatan antar dua negara yang merupakan bagian dari diplomasi.

Penelitian kedua, Peneliti menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Chumphot Nurakkate yang berjudul “*The Conflict in Southern Thailand*”. Dalam penelitiannya, Nurakkate menganalisis tentang gerakan separatis di Thailand Selatan dengan menggunakan aspek historis, politik, ekonomi, agama, dan budaya yang berpengaruh dalam konflik ini. Identitas Melayu menjadi kunci mengapa masyarakat Muslim Thailand Selatan melakukan pemberontakan. Hal ini

menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakannya untuk mengakhiri konflik di Thailand Selatan.

Penelitian ketiga, Peneliti menggunakan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Lia Aprilia Fitria yang berjudul “Upaya Pemerintah Thailand dalam Penyelesaian Konflik di Thailand Selatan tahun 2004-2009”. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik di Thailand Selatan dan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Thailand untuk mengatasi konflik tersebut dan membahas sejarah konflik di Thailand Selatan.

Penelitian keempat, Peneliti menggunakan penelitian yang dilakukan Dr S.P. Harish seorang peneliti yang khusus membahas tentang *Political Violence* khususnya di Asia Tenggara dengan judul “*Changing Conflict Identity: The Case of the Southern Thailand Discord*”. Menurut Harish kekerasan yang terjadi di Thailand Selatan yang dimulai dari tahun 2004 tidak menunjukkan tanda penurunan intensitas konflik. Harish berpendapat bahwa perubahan ini dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan peran identitas dalam konflik, serta Harish menjelaskan transformasi konflik Thailand Selatan dari perselisihan etnis terutama menjadi perselisihan agama yang cenderung dominan.

Penelitian kelima, adalah penelitian dari Yasril Yazid yang berupa jurnal berjudul “Konflik Minoritas Melayu dan Militer Thailand Analisis Terhadap Krisis Politik di Thailand Selatan” yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah UIN Suska Riau. Jurnal tersebut membahas mengenai latar belakang Kesultanan Pattani tradisional yang berkultur Melayu dan status wilayah tersebut bagian dari Kerajaan Thailand moderen yang berorientasikan Buddha, dualisme tersebut yang menurut Yasril merupakan salah satu faktor penyebab utama konflik yang berkepanjangan di Thailand Selatan.

Penelitian ini menjelaskan tentang *Historical Background* yang berkisar tahun 1910 hingga memasuki abad ke-21, menurutnya masalah dari tahun ketahun juga berasal dari ketidakseriusan pemerintah Thailand mengatasi gerakan separatis sehingga konflik berkepanjangan pun terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam menjelaskan masalah tersebut. Di penelitian



ini untuk membantu menganalisis fenomena yang ada menggunakan konsep Minoritas.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dari kelima penelitian yang dijadikan sebagai penelitian terdahulu dalam penelitian ini, berikut merupakan rangkuman terhadap kelima penelitian terdahulu yang telah direview dan akan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Komparasi Penelitian Terdahulu

	Literature 1	Literature 2	Literature 3	Literature 4	Literature 5
<b>Judul</b>	Diplomasi Thailand-Malaysia Dalam Mengatasi Gerakan Separatis di Thailand Selatan Periode 2000-2009	<i>The Conflict in Southern Thailand</i>	Upaya Pemerintah Thailand dalam Penyelesaian Konflik di Thailand Selatan tahun 2004-2009	<i>Changing Conflict Identity: The Case of The Southern Thailand Discord</i>	Konflik Minoritas Melayu dan Militer Thailand Analisis Terhadap Krisis Politik di Thailand Selatan
<b>Peneliti</b>	Desy Arisandy	Chumphot Nurakkate	Lia Aprila Fitra	S.P. Harish	Yasril Yazid
<b>Teori/ Konsep</b>	Diplomasi, <i>National Interest</i> , Kerjasama, Keamanan, Kebijakan Luar Negeri	<i>National Identity, Role of Identity</i>	Teori Konflik, Teori Penyebab Konflik	<i>Role of Identity</i>	Konsep Minoritas
<b>Pendekatan</b>	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
<b>Argumen</b>	Malaysia sebagai negara tetangga Thailand yang memiliki persamaan <i>Culture</i> dengan Thailand Selatan yang mayoritas beretnis Melayu dapat memediumisasi penyelesaian konflik di Thailand Selatan	Identitas Melayu menjadi kunci mengapa konflik di Thailand Selatan, menjadi konflik yang berkepanjangan. Thailand harus mengkaji ulang kebijakan mereka untuk dengan cara yang berbeda.	Kebijakan Pemerintah dalam menangani konflik di Thailand Selatan.	Transformasi konflik Thailand Selatan dari perselisihan etnis terutama menjadi perselisihan agama yang cenderung dominan	Dualisme antara Muslim dengan Buddha merupakan salah satu faktor penyebab utama konflik yang berkepanjangan di Thailand Selatan
<b>Kesimpulan Penelitian</b>	Meski gerakan Separatis di Thailand Selatan tidak dapat Diredam namun kedua negara tersebut merasa puas dengan hasil Diplomasi mereka untuk Menurunkan jumlah intensitas konflik serta korban dari gerakan separatis tersebut, Diplomasi ini juga berdampak semakin kuatnya hubungan bilateral antar negara yang sebelumnya sempat meregang.	Identitas Melayu Menjadikan masyarakat Thailand Selatan khususnya Pattani melakukan gerakan separatis.	Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand kurang Berhasil, dari ketiga upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Thailand Selatan hanya konsoliasi yang merupakan pemberian subsidi yang dapat dikatan berhasil, pemberian otonomi khusus belum pernah tercapai.	Penyebab utama konflik di Thailand Selatan. selain identitas sebagai masyarakat etnis melayu, identitas sebagai muslim juga merupakan salah satu penyebab adanya pembontakan.	Rumusan dan ide sebuah negara Pattani merdeka ini adalah suatu aspirasi yang bersifat utopia semata. Sebaliknya, objektif utama pihak gerakan separatis adalah mendapatkan kekuasaan dan melibatkan diri dalam menentukan pembangunan sosio-ekonomi dan politik di wilayah-wilayah Selatan.

(Sumber: Data diolah oleh Peneliti)

Berdasarkan kelima penelitian tersebut menguatkan argumen Peneliti bahwa konflik berkepanjangan di Thailand Selatan masih menjadi suatu masalah yang serius. Penelitian *pertama*, menjelaskan tentang diplomasi yang dilakukan Thailand dengan Malaysia dalam menangani konflik di Thailand Selatan. Penelitian *kedua*, menjelaskan bahwa akar permasalahan di Thailand Selatan merupakan perbedaan etnis serta agama antara Melayu-Muslim dengan Thai-Buddha. Penelitian *ketiga*, menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Thailand dalam kurun waktu 2004-2009 berupa Konsiliasi, Mediasi serta Koersi, namun hanya upaya Konsoliasi yang dianggap berhasil. Penelitian *keempat*, hampir menyerupai penelitian kedua namun perbedaan dalam penelitian keempat ini adalah bentuk kasus atau permasalahan yang berubah bentuk, yang semula hanya perbedaan Etnis menjadi permasalahan agama atau identitas yang semakin pelik sehingga pemberontakan tetap eksis dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian *Kelima*, menjelaskan tentang *Historical Background* mengapa terjadinya konflik serta melihat perubahan gerakan separatis dari tahun- ketahun yang semakin berbeda antara gerakan separatis satu dengan yang lainnya.

Penelitian dilakukan dalam skripsi ini cenderung berfokus pada proses Bina-Damai, yaitu membahas mengenai tentang Upaya Bina-Damai Pemerintah Thailand dalam Menurunkan Intensitas Konflik di Thailand Selatan 2013-2018. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Bina-Damai yang dapat menurunkan intensitas konflik yang terjadi di Thailand Selatan.

## 2.2 Landasan Konseptual

### 2.2.1 Teori Konflik

Konflik adalah konfrontasi yang melibatkan dua pihak atau lebih yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan. Konflik dapat bersifat nyata dengan karakter dapat dikenali dari tindakan atau perilaku para pihak. Konflik juga dapat bersifat laten dengan karakter tidak terlihat namun belum sepenuhnya terselesaikan sehingga memiliki potensi untuk terjadi kembali. (Ashari, 2015) Terdapat tiga bentuk konflik dalam konteks Hubungan Internasional yakni (a) Konflik antarnegara; konflik antarnegara merupakan isu utama dalam Hubungan Internasional dan upaya mencegah serta mengatasi konflik jenis ini telah sejak lama menjadi perhatian masyarakat internasional. (b) konflik internal; konflik internal juga menjadi perhatian masyarakat internasional dewasa ini, dikarenakan besarnya dampak yang ditimbulkan konflik internal terhadap warga negara tempat konflik berlangsung maupun terhadap negara- negara disekitarnya. Meskipun konflik internal merupakan persoalan domestik suatu negara, pandangan bahwa masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik jenis ini makin menguat. Keterlibatan masyarakat internasional untuk menyelesaikan konflik jenis ini semakin menguat. Keterlibatan masyarakat internasional untuk menyelesaikan konflik internasional dapat dilakukan melalui intervensi atau mediasi. Pendekatan ini juga lazim diimplementasikan untuk menyelesaikan konflik yang mengarah pada pembentukan negara baru. (c) konflik yang mengarah kepada pembentukan negara baru. (Ashari, 2015)

Michael E. Brown dalam bukunya yang berjudul "*The International Dimension of Internal Conflict*" mengatakan bahwa memahami konflik internal sangatlah penting karena sering melibatkan negara-negara tetangga sehingga bisa menimbulkan konflik perbatasan. Pengungsi yang menyeberang ke wilayah Negara tetangga atau pemberontak yang mencari perlindungan ke Negara yang berbatasan langsung menimbulkan masalah baru yang tidak mudah untuk diselesaikan karena tidak hanya bernuansa politik tetapi juga ekonomi, etnis, budaya dan keagamaan. Bahkan masalah pelanggaran perbatasan ini bisa memicu konflik bersenjata antar negara yang bertetangga. Selain itu, konflik internal juga

sering mengundang perhatian dan campur tangan dari negara-negara besar yang terancam kepentingannya dan organisasi internasional. (Jemadu, 2008)

Selain itu, Brown mengemukakan teorinya yang menegaskan bahwa kompleksitas konflik internal tidak bisa dijelaskan hanya oleh satu faktor atau variabel. Untuk itu Brown membedakan *the underlying causes of conflict* dari *the proximate causes of conflict*. Secara lebih spesifik Brown memberikan penekanan pada pengaruh kebijakan atau perilaku elit pemimpin sebagai pemicu terjadinya ledakan konflik di suatu daerah. Brown tidak membantah bahwa faktor-faktor struktural, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan perceptual menjadikan suatu daerah rentan terhadap konflik tetapi kita tidak boleh mengabaikan peran dari elit pemimpin yang memicu terjadinya konflik. Di bawah ini peneliti akan mengutip secara lengkap tabel yang dikemukakan oleh Brown. Brown membedakan dengan jelas penyebab-penyebab konflik yang pokok dan pemicu langsung dari konflik internal, yaitu sebagai berikut:



Tabel 2.2 Sebab-sebab Utama dan sebab-sebab Pemicu Konflik Internal

	Sebab-sebab Utama <i>(Underlying Causes)</i>	Sebab-Sebab Pemicu <i>(Proximate Causes)</i>
Faktor Struktural	Negara yang lemah ( <i>Institutional Weakness</i> )	Negara yang sedang runtuh/gagal
	Kekhawatiran tentang keamanan Internal	Perubahan kekuatan militer
	Geografi Etnis	Perubahan pola demografis
Faktor Politik	Lembaga politik yang diskriminatif	Transisi politik
	Ideologi nasional yang eksklusif <i>(Exclusive Politics)</i>	Ideologi eksklusif yang semakin Berpengaruh
	Politik antar-kelompok	Persaingan antar kelompok
	Politik Elit	Pertarungan kepemimpinan ( <i>Warlord Politics</i> )
Faktor Ekonomi/Sosial	Masalah Ekonomi	Masalah Ekonomi yang semakin Terpuruk
	Sistem Ekonomi yang diskriminatif	Ketimpangan Ekonomi yang semakin lebar
	Pembangunan ekonomi dan Modernisasi	Pembangunan Ekonomi dan Modernisasi yang cepat
Faktor Sosial Budaya	Pola diskriminasi budaya	Pola diskriminasi budaya yang semakin kuat
	Sejarah kelompok yang bermasalah	Penghinaan etnis dan propaganda

(Sumber: Tabel diolah oleh Peneliti melalui rangkuman dari Aleksius Jemadu. 2008.)  
(Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal:205)

Berdasarkan perspektif Brown, ia menyebutkan bahwa faktor perilaku pemimpin merupakan yang terpenting jika dibandingkan dengan faktor pemicu konflik lainnya. Dari berbagai macam konflik yang terjadi, konflik dapat diselesaikan dengan cara diplomasi untuk meresolusi konflik tersebut. Resolusi konflik menjadi salah satu cara diplomasi terbaik untuk menurunkan eskalasi konflik dan konflik yang terjadi dapat berubah menjadi perdamaian, dengan jalan diplomasi ini penyelesaian konflik diselesaikan di atas meja perundingan. (Jemadu, 2008)

### 2.2.2 Konsep *Bina-damai*

Konflik yang dialami suatu negara menjadi permasalahan yang sulit untuk dihindari, terlebih lagi karena adanya perbedaan etnis, bahasa, budaya, ras maupun agama. Perbedaan dapat menjadi berkah bagi suatu negara karena keberagaman tersebut, akan tetapi dapat menjadi masalah karena dapat menimbulkan ketegangan atas perbedaan yang dimiliki. Terlebih lagi, konflik tersebut dapat disebabkan oleh permasalahan yang telah mengakar sejak lama yang telah berlarut, sehingga mengakibatkan konflik tersebut kembali terjadi.

Negara yang menjadi tempat perlindungan bagi masyarakatnya perlu menciptakan keamanan dan perdamaian. Pemulihan stabilitas ditengah konflik ataupun pasca konflik tersebut perlu diupayakan oleh negara untuk menjaga stabilitas serta pemberdayaan institusi serta struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dalam hubungan internasional, hal tersebut dikenal dengan konsep bina-damai, yang pada umumnya memiliki tujuan untuk menciptakan dan menjamin keamanan serta menjaga agar konflik tidak terjadi kembali muncul (*re-emerge*).

Konsep bina-damai pertama kali diterapkan oleh PBB, pada misi di Namibia tahun 1978 dengan target utama untuk menjalankan proses rekonstruksi pasca konflik di negara tersebut. Konsep ini kemudian berkembang dan mencakup aspek-aspek lain seperti penyaluran bantuan kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia, pemeliharaan ketertiban, percepatan rekonsiliasi pemulihan dampak sosial, repatriasi pengungsi, dan rekonstruksi perekonomian. Perluasan cakupan ini antara lain dipromosikan oleh Sekretaris Jenderal PBB yakni, Bhoutros Bhoutro-Ghali dalam dokumen berjudul “*an agenda for peace*” yang terbit pada tahun 1992. Bhoutros-Ghali menegaskan bahwa rekonstruksi pasca konflik juga harus mencakup upaya pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri yang merupakan elemen penting bagi terpeliharanya perdamaian. Bhoutro-Ghali juga menekankan aspek saling keterkaitan antara pembangunan dan perdamaian sebagai bagian tak terpisahkan dari Bina-damai. (Ashari, 2015)

Menurut Bhoutro-Ghali, Bina-damai memiliki definisi sebagai berikut:

*“Comprehensive efforts to identify and support structures which will tend to consolidate peace and advance a sense of confidence and well-being among people. Through agreements ending civil strife, these may include disarming the previously warring parties and the restoration of order, the custody and possible destruction of weapons, repatriating refugees, advisory and training support for security personnel, monitoring elections, advancing efforts to protect human rights, reforming or strengthening governmental institutions and promoting formal and informal processes of political participation”.* (Boutros-Ghali, 1992)

Berdasarkan definisi tersebut, jelas bahwa dalam proses bina-damai, kedua belah pihak yang berselisih perlu sepakat untuk menghentikan perselisihan. Selain itu, dukungan dari pihak eksternal juga diperlukan untuk dapat menjadi penasihat dan penengah dari upaya bina-damai. Definisi dari konsep bina-damai tersebut diperkuat oleh Johan Galtung, yang menyatakan bahwa proses bina-damai adalah proses pembentukan perdamaian yang tertuju pada implementasi praktis perubahan sosial secara damai melalui rekonstruksi dan pembangunan politik, sosial dan ekonomi. (Galtung, 1990)

Dalam konteks konflik, Galtung memperkenalkan konsep segitiga konflik dan perbedaan antara kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan budaya, serta memperkenalkan antara perdamaian negatif dan perdamaian positif. Konsep tersebut mengarah kepada upaya penyelesaian konflik dalam proses bina-damai akan selalu mengarah kepada sumber yang dapat menjadi penyebab konflik tersebut. Sehingga, dalam prosesnya Galtung berpendapat bahwa bina-damai akan memerlukan waktu yang panjang karena untuk mengatasi permasalahan hingga keakarnya, perlu penelusuran dan penyelesaian akar konflik tersebut. Hal ini akan mengubah asumsi-asumsi yang kontradiktif, serta memperkuat elemen yang dapat menghubungkan pihak-pihak yang bertikai dalam suatu formasi baru demi mencapai perdamaian positif. (Galtung, 1990)

Selain Galtung, Andi Knight dalam bukunya *“Building Sustainable Peace”* menyatakan bahwa Bina-damai terkait dengan dua hal esensial yaitu dekonstruksi struktur kekerasan dan merekonstruksi struktur perdamaian. Dalam upaya bina-damai, strategi penyelesaiannya juga memiliki beberapa tahapan yaitu, 1) *short-term* (2 bulan-2 tahun), 2) *mid-term* (2 tahun-5 tahun), dan 3) *long-term* (5-10

tahun) yang mencakup berbagai dimensi seperti politik, ekonomi, sosial dan internasional. Bina-damai umumnya dilakukan oleh aktor domestik seperti masyarakat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun tidak dipungkiri aktor eksternal seperti organisasi internasional, negara donor, dan *international non-governmental organizations* (INGOs) memiliki peranan penting dalam memfasilitasi dan mendukung upaya Bina-damai. (Galtung, 1990)

Dalam proses upaya perdamaian, bina-damai merupakan tahapan yang terberat bagi pihak-pihak yang berkonflik. Proses atau tahapan yang harus dilalui oleh pihak yang berkonflik meliputi tahapan transisi dan tahap konsolidasi. Kedua tahapan tersebut memiliki orientasi yang penting bagi proses perdamaian yaitu, orientasi struktural dan orientasi kultural. Pada tahapan transisi, pemerintah menggunakan pendekatan yang berbasis pada pendekatan yang dominan. Pendekatan ini sangat menekankan penerapan model *Grotian* yang mengacu kepada eksistensial bersama dan *Kantian* tentang pemulihan norma-norma liberal untuk memulihkan *civil society*. (Hampson, 1997)

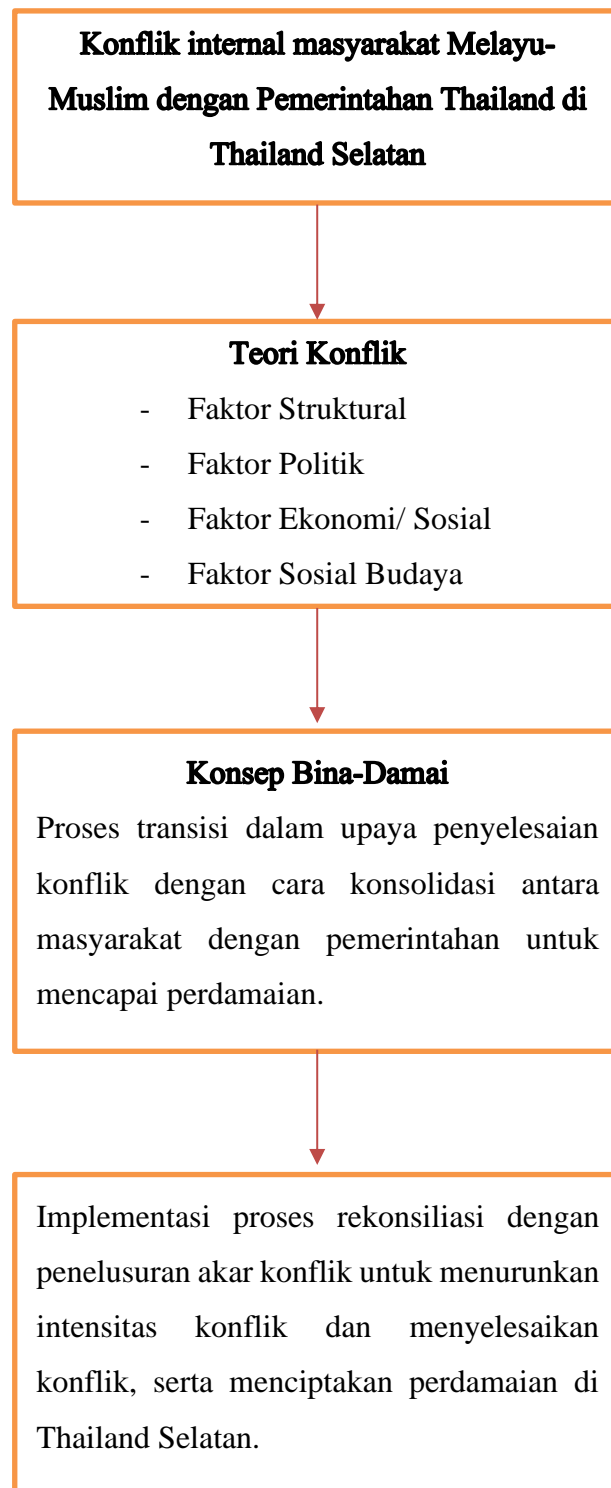
### 2.3 Kerangka Pemikiran

Thailand adalah sebuah negara yang memiliki isu keamanan nasional. Isu gerakan separatis yang berlarut-larut di Thailand Selatan dilatarbelakangi etnis minoritas yang ingin melepaskan diri dari Kerajaan Thailand. Berdasarkan sejarahnya, gerakan separatis mulai hadir di Thailand pada tahun 1948. Seiring perkembangan waktu, gerakan tersebut kembali dan menjadi permasalahan yang masif dan kompleks yang menimbulkan korban sipil maupun pihak militer bersenjata. Menurut *Deep South Watch*, target kekerasan mayoritas mereka yang terluka dan terbunuh selama 15 tahun terakhir sejak 2004 adalah warga sipil yang tidak bersenjata sebanyak 61% (*Soft Target*) sedangkan Militer, Polisi dan Angkatan bersenjata sebanyak 38% (*Hard Target*),

Untuk memahami permasalahan yang terjadi di Thailand Selatan, peneliti menggunakan konsep dari Teori Konflik. Konsep ini peneliti gunakan untuk memahami faktor yang menyebabkan hadirnya konflik yang terjadi di Thailand Selatan. Hal ini ditunjukkan untuk peneliti memahami gerakan separatis yang muncul kepublik dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Thailand yang dinilai

tidak adil oleh Masyarakat Melayu Muslim di Thailand Selatan. Selain itu, tekanan dari lembaga-lembaga militer yang dilandasi oleh kebijakan politik yang otoriter terhadap masyarakat sipil. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya dapat melindungi warga negaranya dari penderitaan serta memberikan keamanan justru menjadi penyebab dari ketengangan konflik bagi rakyatnya sendiri, yang idealnya negara merupakan pelindung warga yang tinggal di wilayah teritorial kekuasaan negara tersebut.

Selanjutnya peneliti menggunakan konsep Bina-damai untuk membantu peneliti dalam memahami upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi konflik di Thailand Selatan. Secara umum, konsep bina-damai dapat dipahami sebagai sebuah proses jangka panjang, penelusuran dan penyelesaian akar konflik, mengubah asumsi-asumsi yang kontradiktif, serta memperkuat elemen yang dapat menghubungkan pihak-pihak yang bertikai dalam suatu formasi baru demi mencapai perdamaian positif (*Negative Peace*). Secara khususnya, konflik di Pattani sedang menjalani fase *long-term* (>15 tahun) sejak 2004, namun dalam trennya sejak 2013 hingga 2018, konflik di Thailand Selatan tersebut mengalami penurunan tingkat kekerasan. Penurunan tingkat kekerasan tersebut terjadi setelah adanya proses perdamaian pada tahun 2013 pada saat transisi pemerintahan Prayuth. Atas dasar tersebut, peneliti ingin menganalisis mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam menurunkan intensitas konflik pada tahun 2013-2018, sehingga kerangka pemikiran yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pemikiran

(Sumber: Gambar diolah oleh Peneliti)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif menurut John W. Creswell adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami aspek-aspek tertentu melalui pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur tertentu. Data biasanya diperoleh dari *setting* tertentu dan analisis data dibangun dari tema khusus ke tema umum (induktif). Kemudian peneliti membangun interpretasi tertentu terhadap hasil analisis data tersebut. Laporan akhir dari penelitian selanjutnya umumnya ditulis secara fleksibel. (Creswell, 2014). Penelitian ini didasari dengan temuan data terakait konflik internal yang terjadi di Thailand Selatan antara etnis Melayu-Muslim dengan Pemerintah Thailand. Berdasarkan pendekatan kualitatif, peneliti melakukan penelitian atas dasar data-data yang peneliti temukan terkait konflik tersebut.

Alasan digunakannya metode kualitatif dianggap tepat karena dapat mendeskripsikan apa yang sedang terjadi saat ini, dan didalam penelitian ini terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan interpretasi mengenai kondisi saat ini yang sedang terjadi di Thailand Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memaparkan sekaligus menganalisis tentang Upaya Bina-Damai Pemerintah Thailand dalam Menurunkan Intensitas Konflik di Thailand Selatan 2013-2018.



### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penentuan atas batasan-batasan dalam sebuah penelitian dengan maksud untuk menghindari permasalahan diluar objek yang diteliti. Dengan tujuan untuk mempermudah pembaca yang ingin memahami penelitian yang dilakukan secara garis besarnya. Penelitian ini, memiliki fokus pada beberapa bagian, yaitu :

1. Mendeskripsikan faktor yang menjadi penyebab dari konflik internal di Thailand Selatan berdasarkan teori konflik, khususnya yang terjadi pada tahun 2013-2018
2. Mendeskripsikan proses bina-damai yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam menurunkan intensitas konflik di Thailand Selatan yang dianalisa berdasarkan konsep bina-damai.

### 3.3 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang diperoleh Peneliti adalah jenis data sekunder. Peneliti memperoleh data tersebut melalui sumber-sumber baik berupa jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen-dokumen berkaitan dengan Upaya Bina-Damai Pemerintah Thailand dalam Menurunkan Intensitas Konflik di Thailand Selatan. Peneliti memperoleh data dalam penelitian ini melalui artikel, jurnal internasional, dan website resmi seperti *www.oic.org* serta *deepsouthwatch.org* yang mewakili data untuk Thailand Selatan, juga laporan tahunan, laporan berita yang memiliki kredibilitas dalam menerbitkan atau menyiarkan data seperti *foreignpolicy.com*. Sumber-sumber yang tersaji dalam penelitian ini keseluruhannya memiliki kaitan terhadap Upaya Bina-Damai Pemerintah Thailand dalam Menurunkan Intensitas Konflik di Thailand Selatan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka untuk mendukung data-data yang diperoleh. Kajian pustaka adalah sarana mengumpulkan data dengan membaca dan mengkaji sumber data yang berasal dari dokumen-dokumen, buku, jurnal, hasil penelitian dan lain-lain (Sarwono, 2006). Studi dokumentasi, Peneliti berusaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti, seperti jurnal, arsip, buku, laporan, peta, foto, dan pemberitaan elektronik seperti *Foreign Policy*, *The Diplomat*, *Deep South Watch*, *DW News*, *South China Morning Post* (SCMP) dan lain lain yang relevan dengan sejarah dan dinamika dari Thailand Selatan.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman pada 2014, analisis kualitatif terdiri atas tiga gelombang aktivitas yaitu reduksi atau data, penyajian data, dan konklusi atau verifikasi. Pada tahap kondensasi data, dimulai dengan membaca beberapa kali data bersangkutan, kemudian dilanjutkan dengan merangkum data tersebut. Selanjutnya adalah menguji dan memilah data yang nantinya ekstraksi dari data tersebut ditempatkan sesuai tema. Pengelompokan data ini untuk menemukan esensi, objektif dari data. Pada tahap reduksi data yang kedua, peneliti kemudian mencari hubungan atau korelasi antar tema di dalam data.

#### **1. Kondensasi Data**

Dalam tahap kondensasi data, peneliti melakukan penyederhanaan data untuk proses seleksi atau pemilihan data-data yang terdapat pada dokumen yang telah diperoleh agar sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif melalui cara diseleksi, ringkasan, ataupun uraian dapat disampaikan menggunakan kata-kata peneliti, namun tidak merubah isi dari data tersebut. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti mencari data yang sesuai dengan penelitian ini baik pola penelitian, maupun tema penelitian tersebut, sehingga data yang tidak sesuai dan tidak penting dibuang. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data

berdasarkan temuan dari dokumen, laporan, kabar berita yang kredibel mengenai konflik di Thailand Selatan, serta upaya penanganan konflik yang sedang terjadi baik oleh pihak internal seperti pemerintah Thailand maupun pihak eksternal sebagai bantuan penangan konflik tersebut.

## **2. Penyajian data**

Penyajian data, pada tahap terdiri atas beberapa strategi guna memberikan suatu penjelasan antar tema-tema yang telah diabstraksi dari data. Penyajian data tidak hanya mendeskripsikan data yang telah peneliti olah, melainkan peneliti juga dapat memberikan suatu interpretasi dari data bersangkutan. Data yang didemonstrasikan telah terorganisasi, tereduksi yang memungkinkan sebuah konklusi atas data tersebut. Contoh penyajian data antara lain, grafik, matriks, diagram, dan jaringan.

## **3. Konklusi**

Tahap akhir yakni konklusi dan verifikasi dalam tahap ini peneliti mengonfirmasi validitas, reliabilitas, keteraturan, dan kecocokan dari sebuah data. Dari hasil verifikasi data peneliti kemudian menyimpulkan apakah data yang telah teranalisis memenuhi dan menjawab pertanyaan dan tujuan peneliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Konflik internal antara pemerintah Thailand dengan etnis Melayu-Muslim di wilayah Thailand Selatan sudah terjadi sejak tahun 1902, namun di era modern konflik ini mengalami eskalasi yang tinggi pada tahun 2004 sampai dengan saat ini. Walaupun demikian hubungan antara pemerintah Thailand dengan etnis Melayu-Muslim sempat mengalami proses perundingan perdamaian yang hampir melahirkan zona aman antara kedua belah pihak.

Adanya dialog bina damai dengan pihak ketiga seperti Malaysia dan OKI turut membantu proses perdamaian di Thailand Selatan. Walaupun pada akhirnya dialog pada tahun 2013 di Kuala Lumpur kurang maksimal dan delegasi dari kedua belah pihak kurang berpengalaman. Pembicaraan dirusak oleh faktor yang sama, seperti adanya serangan yang dilakukan oleh 'oknum' dari gerakan separatis maupun militer Thailand, persaingan politik atau kudeta di Bangkok juga menghambat proses bina damai di Thailand Selatan. Berkat adanya *peace dialogue* kedua belah pihak mempunyai pemahaman yang lebih baik satu sama lain, dan juga terlihat pemerintahan Yingluck Shinawatra lebih terbuka terhadap persoalan di Thailand Selatan.

Ketidakstabilan politik dalam negeri Thailand seperti kudeta pada tahun 2014 membuat kemunduran terhadap demokrasi Thailand. sistem politik Thailand yang labil dan siklus kudeta yang tak berujung gagal untuk menginspirasi kepercayaan terhadap Melayu-Muslim dalam proses bina damai. Melanjutkan status quo hanya menawarkan solusi jangka pendek dalam mengatasi masalah di Thailand Selatan, dari tahun 2004 hingga 2009 terdapat hampir 7000 orang tewas sebagai eskalasi kekerasan di Selatan. Kelanjutan status quo berarti sama saja membiarkan banyak

kematian. Walaupun kecenderungan kekesaran di Thailand Selatan mengalami penurunan dari 2004-2018, jalan yang masih sangat Panjang untuk menemukan solusi perdamaian yang berkelanjutan.

Faktor internasional juga sangat berpengaruh dalam proses bina damai di Thailand Selatan, pemerintah Thailand dan beberapa kelompok pemberontak mencari jalan keluar dari konflik melalui negosiasi, namun menurut Peneliti yang telah menyimpulkan dari banyak literatur penelitian tentang Thailand Selatan berpendapat perdamaian yang terjadi sekarang hanya berupa angan-angan yang tidak akan tercapai dan menemui jalan buntu hingga sekarang. Semua pihak yang terlibat dalam proses bina damai di Thailand Selatan harus memikirkan cara lain yang berbeda dari sebelumnya, lebih serius dalam penanganan HAM, strategi politik yang baru seperti memberikan otonomi khusus terhadap daerah konflik.

## **5.2 Saran**

Dari hasil penelitian dan pemaparan kesimpulan di atas peneliti dapat memberikan saran yang dapat dimanfaatkan dalam membantu peneliti selanjutnya terkait dengan teori konflik dan upaya bina-damai, sebagai berikut:

1. Kepada para peneliti selanjutnya, perlunya pembahasan yang lebih spesifik terkait upaya bina-damai yang dilakukan oleh pemerintah Thailan terhadap konflik yang terjadi di Thailand Selatan, sehingga dapat memperjelas proses bina-damai dalam penyelesaian konflik yang terjadi disuatu negara lainnya. Selain itu, peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat lebih rinci dalam memberikan data terkait konflik yang dibahas pertahunnya dan proses perdamaian secara runut.
2. Untuk pemerintah Thailand, dalam upaya bina-damai di Thailand Selatan terjadi, pemerintah harus lebih terbuka terkait proses-proses dalam perdamaian dengan aktor-aktor yang terlibat. Pemerintah juga harus lebih berinisiasi dalam mengupayakan perdamaian tersebut dan menghindari penggunaan militer untuk menekan kelompok yang dianggap bertentangan pemahaman dengan pemerintah, serta memberikan jaminan keamanan terhadap penduduk sipilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Ashari, K. (2015). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Buzan, Barry. (1991). *People, States, and Fear, An Agenda for International Security Studies in Post-Cold War Era*. Hempstead, Harvester Wheatsheaf.
- Boutros-Ghali, B. (1992). *An Agenda for Peace*. France: United Nation.
- Creswell, J. W. (2014). In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* (p. 4). Sage.
- Galtung, Johan. (1988). *Kekerasan, Perdamaian, dan Penelitian Perdamaian. dalam Mochtar Lubis*. Jakarta.
- Galtung, J. (n.d.). *Positive and Negative Peace*.
- Hampson, F. O. (1997). *Can Peacebuilding Work*. Cornell International Law Journal, Vol. 30.
- Holsti, K. J. (1996). *The state, war, and the state of war*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Jemadu, A. (2008). *Politik Global dalam Teori dan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lawang, R. (1994). *Materi Pokok Pengantar Sosiologi*. Jakarta: universitas terbuka.
- Mas' oed, Mohtar. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, edisi kedua*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- McCargo, D. (2009). *Tearing apart the land. Islam and legitimacy in Southern Thailand*. (pp. 57-59). Singapore: Singapore: National University of Singapore Press.

- Nasikun. (2003). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Neuman, W. (2014). In *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach (7th edition)* (p. 169). Pearson Education.
- Setiadi, E. M. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Preneda Media Group.
- Soetomo. (1995). *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwono, J. (2006). In *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (p. 225). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wyatt, D. (1970). *Hikayat Pattani the Story of Pattani*. Koninklijk Instituut.
- Zeitlin, I. M. (1998). *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

**Jurnal:**

- Arisandy, Desy. (2012). *Diplomasi Thailand Malaysia dalam Mengatasi Gerakan Separatis di Thailand Selatan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Chris Baker, P. P. (2014). *A history of Thailand*. Cambridge University Press
- Chalermripinyorat, Rungrawee. (2020). *Dialogue without negotiation: illiberal peace-building in Southern Thailand*.
- Diamond, L. (2008). *The Spirit of Democracy The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*. New York.
- Hampson, F. O. (1997). *Can Peacebuilding Work*. Cornell International Law Journal, Vol. 30.
- ICG. (2021, 9 23). *Southern Thailand: Insurgency, not Jihad*. Retrieved from *International Crisis Group*: <https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/southern-thailand-s-peace-dialogue-no-traction.pdf>.
- Joll, C. M. (2017). *Language Policy, Linguistic Discrimination, and Thailand's Southern Impasse*. Songkhla: Prince Of Songkla University.



- Kusuma, B. M. (2016). *Masyarakat Muslim Thailand Dan Dampak Psikologis Kebijakan Asimilasi Budaya*.
- Labola, Y. A. (2018). *Konflik Sosial : Dipahami, Identifikasi Sumbernya dan Dikelola-Kajian Literature*, 2-8.
- McCargo, D. (2014). *Southern Thailand: From conflict to negotiations?* Lowy Institute.
- McDermott, G. (2014). *The 2013 Kuala Lumpur Talks: A Step Forward for Southern Thailand*. Peace Research.
- Melvin, N. J. (2007). *Conflict in Southern Thailand: Ismism, Violence and the State in the Patani Insurgency*, 7.
- Meredith L. Weiss, E. A. (2012). *Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Nurakkate, C. (2012). *The Conflict in Southern Thailand*. Centre for Defence and Strategic Studies Australian Defence College.
- Oliver Ramsbotham, T. W. (2011). *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*. Cambridge: Polity Press.
- Scupin, R. (2013). *South Thailand: Politics, Identity, and Culture*. The Journal of Asian Studies / Volume 72 / Issue 02.
- Srisompob Jitpiromsri, P. C. (2019). *Introduction: Conflict in Deep South Thailand: Never-ending stalemate?* 7-8.
- Wahono, S. (2008). Implementasi Nota Kesepahaman (MoU). *Helsinki di Provinsi NAD Tahun 2005-2008*.
- Yazid, Y. (2009). *Konflik Minoritas Melayu dan Militer Thailand*. 15.
- Irawan, Y. (2016). *Strategi Resoulusi Konflik Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Konflik Thailand Selatan*. Padang: Universitas Andalas.

### **Laporan:**

- Adam Burke, P. T.-o. (n.d.). Subnational Conflict and International Development Assistance . *The Case of Southern Thailand*. 2013
- FP. (2015). *The New King of Siam Prayuth Junta*. Sebastian Strangio.

- MFA. (2018, March 8). Press Release : *Permanent Representatives to the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) Praised Developments in Thailand's Southern Border Provinces (SBPs)*. Thailand, South Thailand.
- Panjor, R. (2016). *When peace goes on: the adjustment of people under conflicts in the past year*. Deep South Watch, <https://deepsouthwatch.org/th/node/8140>.
- Pathan, D. (2018, 10 17). *Thailand Installs Controversial Figure in Deep South Peace Talks. Yala, Thailand*.

**Sumber (Online):**

- Bangkok Post. (2019, February 25). Policing Islamic Schools to Secure the State. Retrieved from Bangkok Post: <https://www.bangkokpost.com/news/security/1634450/policing-islamic-schools-to-secure-the-state>.
- Council On Foreign Relations. (24 April 2019). <https://www.cfr.org/backgrounder/muslim-insurgency-southern-thailand>
- Deep South Watch. (Agustus 23, 2019) <https://deepsouthwatch.org/th/node/11928>  
<https://deepsouthwatch.org/th/node/8140>  
<https://deepsouthwatch.org/th/node/11856>
- Factbook, C. (2019). Factbook. United States: Central Intelligence Agency. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/thailand/>
- FP. ((10 April, 2019). Diakses dari <https://foreignpolicy.com/2019/04/10/thailands-groundhog-day/>
- HRW. (24 Juli, 2019). *Human Right Warch*. Diakses dari [hrw.com: https://www.hrw.org/news/2019/07/24/thailand-new-government-disregards-rights](https://www.hrw.org/news/2019/07/24/thailand-new-government-disregards-rights)
- Keyes, C. F. (2020, July 23). *Encyclopedia Britannica*. Retrieved from Britannica: <https://www.britannica.com/place/Thailand/> diakses pada 2 Agustus 2020
- LIPI, L. C. (2010). LIPI. Retrieved from Pusat Penelitian Politik: <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/361-jalan-panjang-demokrasi-thailand-.html> diakses pada 10 Desember 2020

- Reuters. (10 April, 2019) <https://www.reuters.com/article/us-thailand-malaysia/malaysias-mahathir-pledges-to-help-end-violence-in-thai-south-idUSKCN1MY1R6>
- South China Morning Post. (24 Juli, 2019). <https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3023237/muslim-insurgent-group-thailand-says-it-has-opened>
- Taib, H. (2013, April 29). Penjelasan dan Penegasan. Retrieved from Youtube: [https://www.youtube.com/watch?v=bcWmriF3TNM&ab\\_channel=Hasan Taib](https://www.youtube.com/watch?v=bcWmriF3TNM&ab_channel=HasanTaib) diakses pada 22 September 2021
- Tirto, F. T. (2019, 4 7). Tirto. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/kenapa-militer-thailand-sering-melakukan-kudeta-dk4M> diakses pada 10 Desember 2020
- The Star. (10 April, 2019) <https://www.thestar.com.my/news/nation/2015/09/14/border-wall-msia-thai-2016/>
- The Diplomat. (12 Agustus 2019) <https://thediplomat.com/2017/07/no-end-in-sight-for-thailands-deadly-southern-insurgency/>